

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI BANTEN

Siti Mudawanah*

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info

Abstract

Keywords:

Economic growth, minimum wages and the poverty rate.

This research was conducted to test whether the variables of economic growth and minimum wages have an effect on the poverty rate in the districts and cities of Banten province.

The research method used is a quantitative analysis approach, and in testing research data using the help of an analysis tool, namely Eviews. The population for this study is all data on economic growth, minimum wages and poverty rates in the districts and cities of Banten province for the 2011-2019 period. The sample technique uses the saturation technique, namely using all regencies and cities of Banten Province in 8 regions.

The results and conclusions show that partially economic growth and minimum wages have no effect on poverty levels. While simultaneously economic growth and minimum wages affect the level of poverty..

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis pendekatan kuantitatif, dan dalam menguji data penelitian menggunakan bantuan alat analisis yaitu *Eviews*. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh data pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten periode 2011-2019. Teknik sampel menggunakan teknik jenuh yaitu menggunakan seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Banten sebanyak 8 wilayah.

Hasil dan kesimpulan menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Corresponding Author:

Corresponding Author:
sitimudawanah8@gmail.com

Pendahuluan

Masalah di setiap Negara adalah kemiskinan yang wajib dijadikan sebuah target untuk diberikan sebuah solusi, berbagai alternatif dan beberapa strategi perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan kemiskinan, dari masalah ini bisa jadi akan berdampak pada masalah lainnya seperti pengangguran, kriminalitas, maupun masalah ekonomi lainnya yang akan berpengaruh pada kondisi Negara itu sendiri dan setiap Negara tentu menginginkan yang terbaik untuk Negaranya.

Sesuai Amanah Undang-undang bahwa tujuan Negara Indonesia pada intinya adalah melindungi segenap bangsa serta mensejahterakan masyarakat umum. Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 128.953.000 Jiwa, dimana menjadi peringkat ke 5 Provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Sehingga, dapat digambarkan bahwa Provinsi ini menarik untuk dapat diteliti bagaimana keadaan penduduknya terutama dalam kondisi kesejahteraan maupun keadaan ekonomi yang dimiliki. Kemiskinan yang menjadi masalah juga pada setiap wilayah, di daerah Provinsi Banten dengan jumlah penduduk yang banyak ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang tidak begitu tinggi namun tetap memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sebesar 5,92% tingkat kemiskinan Provinsi Banten di Tahun 2020 dan merupakan nilai ke 29 tertinggi dari total 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Banten, Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemiskinan terendah yang mana data ini didapat dari BPS.

Beberapa faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah baik dari faktor pendapatan yang dapat dilihat dari nilai Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK), dan juga dari faktor pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya. Nilai UMK merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam membijaki terwujudnya kehidupan minimum masyarakat, dengan kebijakan ini diharapkan menjamin tenaga kerja bekerja secara produktif dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri beserta keluarga. Nilai UMK tinggi dapat mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk di wilayah tersebut tinggi sehingga kesejahteraannya tinggi, namun sebaliknya jika nilai UMK yang rendah dapat menggambarkan bahwa pendapatan rendah pada daerah tersebut sehingga tingkat Kemiskinan akan meningkat.

Dasar penentuan nilai UMK dapat dilihat dari berbagai sumber seperti pertumbuhan ekonomi, dan jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat dapat memberikan sumbangsih dalam penentuan UMK yang tinggi dan juga ketika pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat menjadikan nilai UMK yang rendah, sehingga ini menjadi sebuah problematika yang perlu dirumuskan untuk dijadikan sebuah pertimbangan yang tepat bagi setiap pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan guna mewujudkan kepentingan bersama demi masyarakat yang sejahtera dan menekan tingkat kemiskinan suatu daerah.

Untuk itu, tujuan dan urgensi penelitian ini adalah guna mengembangkan penelitian bagaimana Implikasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum dalam Tingkat Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.

Landasan Teori

Tingkat Kemiskinan

Menurut Ari Muliarta Ginting dan Rasbin, (2010) Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan lintas sektoral yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan, seperti: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sedangkan, menurut Sumiyarti, (2019) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi penduduk yang hidup kurang sejahtera. Adapun menurut Tri Angga Sigit dan Ahmad Kosasih, (2020) memberikan pernyataan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam yang jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah (Ery Niswan, Ricola Dewi Rawa, dan Dami : 2021). Menurut Harsida S, Aryati Arfah, dan M. Arifin, (2021) menyatakan kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: a) Kemiskinan Relative, seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya, b) Kemiskinan Cultural, Kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya dan c) Kemiskinan Absolut, Sejumlah penduduk yang tidak mampu memperoleh sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan absolut merupakan kondisi kemiskinan terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan paling minimal.

Maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan merupakan suatu derajat atau ukuran masyarakat yang menggambarkan keadaan masyarakat yang rendah dimana kurang mampu dalam mendapatkan atau memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK)

Menurut Indah Novarizki Ayu, dan Muhammad Husaini, (2013) upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Adapun menurut Foengsitanojoyo Trisantoso Julianto, dan Suparno, (2016) Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Berdasarkan pernyataan Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, (2021) upah minimum yang akan meningkat setiap tahun dapat menawarkan gaji yang diberikan melalui suatu instansi kepada personelnnya sehingga karyawan memiliki gaji/penghasilan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan setiap tahun. Hal ini untuk melindungi bagi pekerja supaya tidak terjebak dalam kemiskinan. Palsnya, anggaran gaji minimal tersebut telah disesuaikan dengan keinginan hidup yang layak yang diperlukan para pekerja.

UMK adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu (Rahmah

Merdekawaty, Dwi Ispriyanti, dan Sugito, 2016). Menurut M. Zahari MS, (2014) pengupahan merupakan sisi yang paling rawan di dalam hubungan industrial. Di satu sisi upah adalah merupakan hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa tenaga yang diberikan, di lain pihak pengusaha melihat upah sebagai biaya. Dalam rangka memberikan perlindungan atau jaring pengaman terhadap pekerja/buruh atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh pemerintah. Menurut Soeharjoto, dan Mitha Rachma Oktavia, (2021) Pekerja menganggap upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya yang berdampak pada adanya upaya dari pekerja meningkatkan pendapatannya, sedangkan perusahaan menganggap upah sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan produksi, sehingga dalam berproduksi perlu melakukan efisiensi dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja.

Jadi, UMK merupakan pemberian atas jasa yang telah dilakukan oleh pekerja atau pegawai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah kemudian digunakan oleh sebuah perusahaan atau pemilik di suatu Kabupaten dan Kota.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut A. Idham dan A. Pananrangi, (2012) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama kurun waktu tertentu belum dapat menjadikan kondisi suatu daerah stabil. Secara makro pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto (PDB) yang berarti adanya peningkatan pendapatan daerah tersebut. Adapun menurut Vibiz Regional Research dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - MPKP, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, (2015) Pemerintah Daerah dipandang perlu memerhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan (welfare) masyarakat.

Sedangkan menurut Tety Marini, (2016) pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang diusahakan melalui perencanaan yang optimal oleh pemerintah terkait. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pemerintah mengacu pada perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB yang menunjukkan seberapa besar andil dari sektor-sektor tersebut pada pertumbuhan ekonomi (Ninda Noviani Charysa, 2013). Maka, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga menambahnya produksi barang atau jasa dengan adanya pendapatan nasional yang meningkat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan penelitian terdahulu yang relevan dengan menggunakan banyak referensi yaitu diantaranya menurut Vibiz Regional Research dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - MPKP, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, (2015) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB per kapita riil) telah terbukti memiliki pengaruh negative (menurunkan) dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun menurut Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, (2021) hasil studi memperlihatkan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran mempengaruhi bersama-sama positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum mempengaruhi negatif signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi variabel

pengangguran mempengaruhi negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan Menurut Ghonimah Zumroatul Ainiyah, dan Dwi Adiyasha, (2020) PDRB tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan penetapan UMK.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dengan data penelitian periode 2011-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis pendekatan kuantitatif dari data pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui website BPS Provinsi Banten : <https://banten.bps.go.id/>.

Populasi dan Sampel

Dalam menguji data penelitian menggunakan bantuan alat analisis yaitu Eviews. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh data pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten periode 2011-2019. Teknik sampel menggunakan tehnik jenuh yaitu menggunakan seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Banten sebanyak 8 wilayah.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode estimasi model regresi panel. Menurut Agus Djoko Santosa, (2016:85-89) terdapat 3 pendekatan yang biasa digunakan yaitu CEM, FEM dan REM. Langkah penyelesaian data panel dengan menggunakan Eviews, tahap 1.pengujian secara deskriptif, tahap ke dua Uji asumsi Klasik, Tahap Ke III Uji REM FEM dan CHOW.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Model

Gambar 1

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	249.845511	(7,62)	0.0000
Cross-section Chi-square	242.960768	7	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.01339	0.625798	17.59896	0.0000
X1	-1.414195	0.187501	-7.542316	0.0000
X2	-1.17E-06	2.26E-07	-5.160025	0.0000

R-squared	0.582577	Mean dependent var	5.653194
Adjusted R-squared	0.570478	S.D. dependent var	2.513494

Berdasarkan gambar di atas, terlihat hasil *probability* 0,00 sehingga model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Common Effect*, Adapun kelanjutan model selanjutnya adalah uji Hausman terlihat pada gambar 2.

Gambar 2.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.309657	2	0.0008

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.833135	-0.883761	0.366525	0.0046
X2	-0.000000	-0.000001	0.000000	0.0043

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/31/22 Time: 22:29
Sample: 2011 2019
Periods included: 9
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

Berdasarkan gambar di atas, terlihat hasil probability 0,00 sehingga model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Random Effect*, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/31/22 Time: 22:31
Sample: 2011 2019
Periods included: 9
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.391563	1.733554	2.533272	0.0138
X1	0.833135	0.712966	1.168548	0.2471
X2	-1.13E-07	1.85E-07	-0.611381	0.5432

Effects Specification

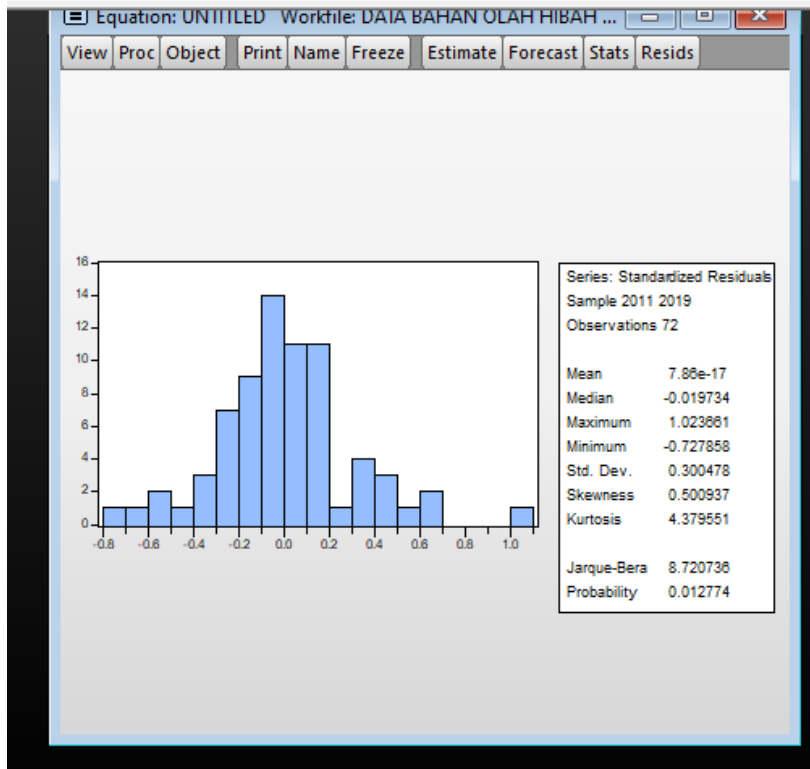
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985709	Mean dependent var	5.653194
Adjusted R-squared	0.983634	S.D. dependent var	2.513494
S.E. of regression	0.321548	Akaike info criterion	0.696906
Sum squared resid	6.410371	Schwarz criterion	1.013109
Log likelihood	-15.08861	Hannan-Quinn criter.	0.822787
F-statistic	475.1479	Durbin-Watson stat	1.747375
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari output di atas, kita dapat membentuk persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = (4.39 + \mu_i) + 0.83X1 - 1.13X2$$
 dimana μ_i merupakan efek individu

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Gambar 3.



Berdasarkan gambar histogram di atas menunjukkan hasil *probability* senilai 0,012 sehingga lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan data tidak berdistribusi normal. Untuk itu alternatif solusi dalam menguji normalitas menggunakan data residual sebagai berikut:

Gambar 4.

	Y	X2	X1	RESID
Mean	5.653194	2367325.	1.834861	7.86E-17
Median	5.280000	2369275.	1.795000	-0.019734
Maximum	10.43000	3913078.	3.670000	1.023661
Minimum	1.330000	1007500.	0.240000	-0.727858
Std. Dev.	2.513494	872170.3	1.053021	0.300478
Skewness	0.271029	0.066336	0.223530	0.500937
Kurtosis	2.292657	1.858556	1.731679	4.379551
Jarque-Bera	2.382481	3.961489	5.425501	8.720736
Probability	0.303844	0.137966	0.066354	0.012774
Sum	407.0300	1.70E+08	132.1100	4.88E-15
Sum Sq. Dev.	448.5534	5.40E+13	78.72860	6.410371
Observations	72	72	72	72

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan hasil *probability* seluruh variabel penelitian masing-masing lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: ABS(RESIDUAL)									
Method: Panel Least Squares									
Date: 12/31/22 Time: 23:18									
Sample: 2011 2019									
Periods included: 9									
Cross-sections included: 8									
Total panel (balanced) observations: 72									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	0.446710	1.092821	0.408768	0.6841					
X1	-0.029688	0.449449	-0.066054	0.9475					
X2	-7.46E-08	1.16E-07	-0.641181	0.5238					
Effects Specification									
Cross-section fixed (dummy variables)									
R-squared	0.167786	Mean dependent var	0.215681						
Adjusted R-squared	0.046981	S.D. dependent var	0.207638						
S.E. of regression	0.202702	Akaike info criterion	-0.225916						
Sum squared resid	2.547456	Schwarz criterion	0.090288						
Log likelihood	18.13298	Hannan-Quinn criter.	-0.100034						
F-statistic	1.388896	Durbin-Watson stat	2.332056						
Prob(F-statistic)	0.212675								

Dari output dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan ($p\text{-value} > 5\%$). Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dimana asumsi ini terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Gambar 6.

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet
				X1	X2		
				X1	1.000000	0.140028	
				X2	0.140028	1.000000	

Output Korelasi di atas, tidak ada satupun variabel yang memiliki korelasi > 0.8 sehingga dapat kita katakan tidak terjadi masalah Multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Gambar 7.

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: Y									
Method: Panel Least Squares									
Date: 12/31/22 Time: 23:26									
Sample: 2011 2019									
Periods included: 9									
Cross-sections included: 8									
Total panel (balanced) observations: 72									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	4.391563	1.733554	2.533272	0.0138					
X1	0.833135	0.712966	1.168548	0.2471					
X2	-1.13E-07	1.85E-07	-0.611381	0.5432					
Effects Specification									
Cross-section fixed (dummy variables)									
R-squared	0.985709	Mean dependent var	5.653194						
Adjusted R-squared	0.983634	S.D. dependent var	2.513494						
S.E. of regression	0.321548	Akaike info criterion	0.696906						
Sum squared resid	6.410371	Schwarz criterion	1.013109						
Log likelihood	-15.08861	Hannan-Quinn criter.	0.822787						
F-statistic	475.1479	Durbin-Watson stat	1.747375						
Prob(F-statistic)	0.000000								

Durbin Watson

Asumsi Non Autokorelasi terpenuhi jika $d_U < D_w < 4 - d_U$

Pada tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel (n) = 72, jumlah variabel (k) = 2, dan $\alpha = 5\%$ kita peroleh

$$d_U = 1.6751$$

$$d_U < D_w < 4 - d_U \rightarrow 1.6751 < 1.747375 < 2.3249$$

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah Autokorelasi.

Berdasarkan gambar 7.

Output Uji t

Hasil uji parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada 2 variabel yaitu X1 dan X2, terlihat pada hasil uji t menggunakan eviews 10 nilai *probability* X1 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2471 adalah di atas 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dan nilai *probability* X2 yaitu upah minimum sebesar 0,5432 adalah di atas 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

Diperoleh nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0.9857. Ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model serta efek individu masing-masing kabupaten/kota mampu menjelaskan sebesar 98.57% variasi Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Banten. Sedangkan sisanya 1.43% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Output Uji F

Nilai F-statistik yang diperoleh adalah 475 dengan *p-value* = 0.00 (lebih kecil dari 5%). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pada uji t dari hasil gambar 7 dalam olah data menggunakan alat analisis yaitu *eviews 10* menunjukkan nilai variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yaitu *probability* sebesar 0,2471 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini terjadi dimungkinkan karena banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan selain pertumbuhan ekonomi, dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi tidak seutuhnya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan penelitian Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, (2021).

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pada uji t dari hasil gambar 7 dalam olah data menggunakan alat analisis yaitu *eviews 10* menunjukkan nilai variabel upah minimum terhadap tingkat kemiskinan yaitu *probability* sebesar 0,5432 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini terjadi dimungkinkan karena banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan selain upah minimum, dengan demikian tingkat upah minimum tidak seutuhnya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan penelitian Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, (2021).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pada uji F dari hasil gambar 7 dalam olah data menggunakan alat analisis yaitu *eviews 10* menunjukkan bahwa Nilai F-statistik yang diperoleh adalah 475 dengan *p-value* = 0.00 (lebih kecil dari 5%). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dimana, ketika pertumbuhan ekonomi dan upah minimum meningkat maka dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Vibiz Regional Research dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - MPKP, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, (2015).

Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.
2. Upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.
3. Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.

Daftar Pustaka

- Agus Djoko Santosa. (2016). *Pengolahan Data Eviews Cara Operasi dan Proses Analisis*. Yogyakarta: Amara Books.
- Ainiyah, G. Z., & Adiyasha, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Umk Di Wilayah Barlingmascakeb. *Medikonis*, 11(1), 45-58.
- Ayu, I. N., Husaini, M., & Pembangunan, D. J. E. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung 2006-2010.
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(2), 279-312.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- Harsida, S., Arfah, A., & Arifin, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maros. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 08-24.
- <https://banten.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5-02-2022.
- Julianto, F. T. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Hal*, 229-256.
- Marini, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten berau. *INOVASI*, 12(1), 108-137.
- Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., & Sugito, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). *Jurnal Gaussian*, 5(3), 525-534.
- Niswan, E., & Rawa, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Kabupaten Bengkayang: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Kabupaten Bengkayang. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 7(2), 23-49.
- Pananrangi, A. I. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(1), 29-38.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 94-102.
- Sumiyarti, S. (2019). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah Dan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Media Ekonomi*, 26(2), 77-88.
- Vibiz Regional Research dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - MPKP, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Riset dan Analisa Investasi Daerah.

Zahari, M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 31-37.